



STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM USAHA PENGAMANAN WILAYAH INDONESIA

Muhamad Asrul¹, Arifin Andika P², Heber³, Eliyanti Agus Mokodompit⁴

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

²Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

³Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁴Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

E-mail: asrulasha@yahoo.com¹, elimikodompit@yahoo.com⁴

Article History:

Received: 29-06-2023

Revised: 03-07-2023

Accepted: 07-07-2023

Keywords:

Strategi Pertahanan,
Keamanan Maritim

Abstract: Dalam menjaga pertahanan maritim, sistem pertahanan yang dibutuhkan memiliki tingkatan yang lebih rumit karena membutuhkan kekuatan pertahanan yang mumpuni dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menggelar setiap operasi guna menjaga kedaulatan maritim di wilayah NKRI. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang terarah agar bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu memperkuat sistem pertahanan maritim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah maritim. Penelitian ini menggunakan literature review dengan metode pengumpulan data yaitu berasal dari buku, jurnal, internet yang mendeskripsikan fakta. Hasil dan pembahasan menjelaskan bahwa negara maritim harus mempunyai kemampuan operasi tempur laut yang sangat mumpuni. Semua angkatan laut harus mempunyai fungsi pertahanan yang efektif karena luasnya wilayah laut akan menuntut tanggung jawab yang berat. Angkatan laut wajib terus dibangun dalam segala bidang agar semakin profesional. Kesimpulan, untuk menerapkan strategi pertahanan wilayah maritim, maka Indonesia membutuhkan stakeholder/entitas dibidang kemaritiman. Sinergi tersebut didukung faktor koordinasi yang bersifat kemitraan dan faktor komunikasi yang merupakan saluran pertukaran informasi antar entitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai dengan Merauke yang wilayahnya didominasi oleh perairan dengan sistem pertahanan yang dimilikinya mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman militer ataupun nirmiliter. Dalam menjaga pertahanan maritim, sistem pertahanan yang dibutuhkan memiliki tingkatan yang lebih rumit karena membutuhkan kekuatan

pertahanan yang mumpuni dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menggelar setiap operasi guna menjaga kedaulatan maritim di wilayah NKRI. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang terarah agar bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu memperkuat sistem pertahanan maritim [1].

Indonesia mempunyai potensi maritim yang sangat besar dan luas dalam bidang ekonomi dan geopolitik. Terkhusus pada pembangunan dan pengelolaan maritim yang tidak hanya dilakukan semata dalam kerangka ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau, luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai 81.000 km. Pengelolaan ini membutuhkan wilayah maritim yang komprehensif [2].

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 2/3 dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas perairan. Perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis dengan daya dukung alam yang tinggi dengan kemampuan megabiodiversity berdasarkan letak geografisnya, sehingga keadaan ini akan menarik keinginan dari negara lain yang memiliki kepentingan untuk mencoba mengelolanya secara legal [3].

Wilayah Indonesia menjadi jalur utama perairan dunia dan diantara dua samudra yang menghubungkan Asia Timur dengan Afrika dan Eropa. Secara geostrategis dan geopolitik mampu memainkan peran penting baik di kawasan maupun global. Indonesia sendiri berbatasan maritim dengan 10 negara yaitu Thailand, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Palau, Timor Leste dan Papua Nugini. Maritim Indonesia terdapat tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terdapat tiga choke points yaitu Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda [2].

Kondisi geografis perairan Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi strategi pertahanan laut yang dapat mencegah niat pihak luar yang akan mengganggu kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI dan mencegah setiap bentuk ancaman dalam bentuk gangguan keamanan dalam negeri serta terwujudnya kondisi laut Indonesia yang terkendali, terutama di wilayah selat-selat strategis. Dengan merumuskan pertahanan laut nusantara yang meliputi strategi pertahanan berlapis, strategi pengangkalan dan strategi pengendalian laut [1].

Meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia menjadi salah satu ancaman kejahatan maritim yang diperkirakan akan terus bertambah. Wilayah Asia menjadi pusat perdagangan dunia mengingat jumlah penduduk Asia yang meningkat tiap tahunnya. Ancaman itu juga menjadi dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia harus berbenah diri untuk mewujudkan laut yang aman bagi semua, mengingat dengan visi poros maritim dunia, sehingga keamanan maritim menjadi prioritas untuk mewujudkan visi tersebut [3].

Karakteristik maritim yang kuat dan kondisi sosial budaya yang beragam, Indonesia dinilai belum mampu memanfaatkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya laut. Dengan itu diperlukannya pendekatan strategis agar Indonesia mampu menjadi Negara maritim yang berdaulat dan kuat. Wilayah perbatasan dan sumber daya laut membutuhkan pertahanan laut yang kuat [4].

LANDASAN TEORI

Tujuan dari poros maritim dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, luas, kuat dan makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pemberdayaan potensi maritim dalam mewujudkan pemerataan

ekonomi indonesia serta pengamanan kepentingan dan keamanan maritim. Presiden Joko Widodo mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mencanangkan lima pilar utama yaitu (1) membangun kembali budaya maritim indonesia, (2) memiliki komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut serta berfokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, (3) berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, industri perkapalan, pariwisata maritim serta logistik, (4) mengajak semua mitra indonesia dalam diplomasi maritim untuk melakukan kerja sama pada bidang kelautan, (5) membangun kekuatan pertahanan maritim [5].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan literature review. Metode pengumpulan data yaitu berasal dari buku, jurnal maupun internet yang mendeskripsikan fakta. Terdapat empat tahapan dalam membuat literature review, salah satunya yaitu memilih topik yang akan direview dengan sumber literatur yang relevan. Permasalahan penelitian terkhusus pada strategi pertahanan maritim indonesia dalam usaha pengamanan wilayah indonesia. Kajian pada pustaka dan sumber yang lain kemudian dianalisis dan hasilnya akan diuraikan dan dibahas menjadi jawaban permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Liddle Hart menjelaskan bahwa strategi merupakan salah satu seni yang mendistribusikan sarana militer demi mewujudkan tujuan akhir dari kebijakan. Untuk pelaksanaan pertahanan maritim indonesia, maka sistem pertahanan semesta harus didukung dengan sumber daya, baik itu yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana [1].

1. Ancaman Maritim

Wilayah laut Indonesia diantaranya berbatasan langsung dengan beberapa Negara khususnya Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen 10 negara sahabat diantaranya dengan Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Vietnam, Philipina, Republik Palau, India dan Thailand. Hampir semua wilayah laut tersebut memiliki potensi kekayaan sumber daya maritim yang hamper sama besarnya seperti Indonesia, sehingga dinilai berpeluang datangnya ancaman maritime diantara Negara-negara tersebut [6].

a. Ancaman kekerasan

Garis perhubungan laut yang terdiri dari Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT) merupakan jalur lalu lintas pelayaran di Indonesia. Dengan garis perhubungan laut yang sangat luas mampu menghubungkan banyak Negara di kawasan Indo-Pasifik yang beorientasi impor dan ekspor sehingga memberikan konsekuensi tingginya aktifitas kapal yang berlayar di jalur tersebut. Sangat memungkinkan terjadinya aksi pembajakan perampokan (sea robbery) dan aksi pembajakan (sea piracy), International Maritime Bureau (IMB) melaporkan terjadi laporan perampokan sebanyak 119 pada tahun 2019 pada wilayah laut seluruh dunia. Tindak kejahatan laut yang berkembang, sehingga keamanan maritim yang makin luas akan menimbulkan ancaman. Dibutuhkannya aksi penindakan dan perlawanan oleh aparat keamanan maritime dengan menggunakan kekuatan bersenjata.

- b. Ancaman terhadap sumber daya laut;
Pengerusakan ekosistem laut, illegal Unreported Unregulated Fishing, pengelolaan sumber daya tanpa batas dan tercemarnya lingkungan adalah sebagian kecil dari bentuk ancaman sumber daya laut. Kebutuhan energy dunia terus meningkat. Data dari Badan Energi Dunia (International Energy Agency-IEA), ditahun 2030 permintaan energy dunia meningkat 45 % atau mengalami peningkatan sebesar 1,6 % pertahun. Sekitar 80% kebutuhan energy dunia dinilai besar karna bersumber dari bahan bakar fosil.
- c. Ancaman pelanggaran hukum;
Kurangnya perhatian terhadap aturan hukum yang berlaku, baik hokum internasional maupun hukum nasional. Kesengajaan dan ketidapkahaman para pelaku kegiatan illegal dilaut terdapat ketentuan dan hukum yang berlaku merupakan muara utama kegiatan pelanggaran hukum dilaut terjadi. Terdapat beberapa ancaman pelanggaran hukum dilaut. Antaranya kegiatan people smuggling, illegal mining, illegal Fishing, illegal logging dan lainnya. Data Food and Agriculture Organisation (FAO) menyebutkan Negara mengalami kerugian akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dengan jumlah mencapai Rp 50 triliun tiap tahunnya. Data resmi Bea Cukai Indonesia terjadi 279 kasus penyeludupan di wilayah laut Indonesia pada tahun 2017 diantaranya penyeludupan BBM, narkoba, hewan, miras, barang, kayu dengan nilai mencapai hamper Rp 551,4 miliar.
- d. Ancaman bahaya Navigasi
Ancaman navigasi dapat mengancam kemandirian dan keselamatan para pelayaran dan dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas dilaut. Wilayah perairan didunia yang sangat luas, terdapat banyak alur dan selat yang sempit membutuhkan bantuan alat navigasi diperairan. Belum seluruhnya perairan dikawasan yang bahaya memiliki navigasi yang lengkap seperti bouy dan suar (light house).

2. Teori Pertahanan

Teori pertahanan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional saat damai, diwaktu perang maupun sesudah perang, guna menghadapi segala ancaman militer maupun non militer untuk keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dan kedaulatan Negara RI demi mewujudkan kemandirian nasional. Untuk mencegah pihak lain menguasai wilayah maritim indonesia maka penting untuk menjaga dan membangun pertahanan. Sehingga menjaga eksistensi dari pihak yang berpotensi mengancam, pada dasarnya pertahanan merupakan kekuatan sipil dan militer sehingga suatu Negara menjamin integritas wilayahnya [3].

3. Pembangunan Pertahanan Kekuatan Maritim

Disuatu wilayah perairan harus mampu memiliki kemampuan operasi tempur yang mumpuni. Angkatan laut memiliki pertahanan yang efektif disuatu wilayah maritime. Luasnya wilayah laut menuntut tanggung jawab yang berat. Angkatan laut dituntut harus membanun disegala bidan agar semakin professional. Terdapat tiga klasifikasi Angkatan Laut yaitu, green, brown dan Blue Water Navy ketiganya memiliki perbedaan kemampuan proyeksi wilayah dan operasi. klasifikasi tertinggi blue water navy mensyaratkan kemampuan operasi lintas samudera, green water navy merupakan kemampuan operasi di wilayah teritorial (khususnya negara kepulauan), . Brown water

navy menitik beratkan operasi di wilayah pantai atau litora. Indonesia membangun pertahanan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritime regional yang disegani oleh kawasan asia. Program MEF merupakan program yang bersifat jangka panjang dan memiliki tiga tahap. Pada akhir tahun 2024 memasuki tahap tiga untuk mencapai kekuatan esensial minimum, terdapat beberapa program yang harus diselenggarakan diantaranya yaitu Rematerialisasi, Revitalisasi, Pengadaan, dan Relokasi. Angkatan laut harus memiliki enam kapabilitas inti yaitu hadir diwilayah terdedepan, control maritime, deterens, kemanan maritim, dan kemampuan selain tempur seperti asistensi kemanusiaan dan penanggulangan bencana [2].

4. Strategi Pertahanan Laut di Sulawesi Tenggara

Provinsi sultra mengandalkan seluruh kekuatan yang ada untuk mempertahankan wilayahnya termaksud dengan forkopimda. Dengan jumlah pulau terbesar 651 diwilayah bagian tenggara Sulawesi, wilayah sultra menjadi tempat terbuka yang berpotensi dimasuki pihak yang tidak memiliki kepentingan. Sehingga tantangan bagi stakeholder kemaritiman di wilayah perairan sultra untuk melindungi dan menjaga sehingga ancaman tidak terjadi. Sehingga hal tersebut menjadi dasar untuk memperoleh suatu konsep yang penting dalam terwujudnya pertahanan laut diwilayah kendari [7].

Terdapat stakeholder diwilayah perairan sultra yaitu Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari, , Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Sulawesi Tenggara, Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sulawesi Tenggara, Komando Resort Militer 143/Halu Oleo Kendari , Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari [7].

Berdasarkan data peneliti forkopimda provinsi sultra menjadi salahsatu peluang strategis terhadap unsur unsur kekuatan wilayah sultra baik militer maupun sipil yang mampu bersinergi dengan baik yang tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi yang sejalan. Forkopimda provinsi sultra mampu menjadi wadah untuk bertukar informasi yang dapat digunakan oleh instansi yang menjalankan fungsinya [7].

KESIMPULAN

Untuk menerapkan strategi pertahanan wilayah maritim, maka indonesia membutuhkan stakeholder/entitas dibidang kemaritiman. Sinergi tersebut didukung faktor koordinasi yang bersifat kemitraan dan faktor komunikasi yang merupakan saluran pertukaran informasi antar entitas.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Asmara, R., Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 2020. 8(2).
- [2] Hadiwijaya, B., Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2022. 9(3): p. 418-429.
- [3] Prasetyo, K.A., L.Y. Prakoso, and D. Sianturi, Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 2021. 5(1).

- [4] Ampun, A.C.R.A. and A.O. Purba, Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021. 8(3): p. 321-325.
- [5] Palar, A.M.K., Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 2022. 7(2): p. 143-158.
- [6] Widyoutomo, A., Pengamanan laut mewujudkan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Maritim*, 2020. 1(1): p. 1-16.
- [7] Palupi, E., A. Ansori, and E. Suhardono, Strategi Pertahanan Laut Di Provinsi Sulawesi Tenggara Melalui Konsep Driving Force. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 2020. 5(3).